

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Paya Tusam terletak di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, awalnya merupakan bagian dari Kecamatan Bingai Langkat sebelum pemekaran pada tahun 2001. Pemekaran tersebut menghasilkan pembagian Kecamatan Bingai menjadi tiga desa, salah satunya adalah Desa Paya Tusam bersama dengan Desa Bingai dan Desa Setungkit. Desa Paya Tusam terdiri dari delapan dusun, salah satu di antaranya yaitu Dusun VI yang terkenal dengan sebutan Cipta Dharma atau Kampung Bali karena keunikannya yang dimilikinya.

Kampung Bali merupakan pemukiman kecil bagi masyarakat etnis Bali yang bertransmigrasi dari pulau Bali. Umumnya, program transmigrasi dari Bali dilakukan karena alasan kepadatan penduduk atau bencana alam. Masyarakat etnis Bali yang kemudian menetap di Dusun VI Kampung Bali ini merupakan hasil dari transmigrasi yang dipicu oleh bencana alam, khususnya letusan Gunung Agung pada tahun 1963 di Bali. Setelah letusan Gunung Agung tersebut, hampir 12.000 orang Bali dipindahkan dari Pulau Bali (Hutapea, Andry Geneton, 2013).

Letusan Gunung Agung pada tahun 1963 merupakan peristiwa penting dimana gunung berapi muda di Bali tersebut meletus kembali setelah tidak aktif selama 120 tahun sejak letusan terakhir pada tahun 1843. Informasi sejarah mengenai aktivitas Gunung Agung terbatas, tetapi terdapat catatan tentang aktivitas letusan yang terjadi sebelumnya, yaitu pada tahun 1808, 1821, dan terakhir pada tahun 1843. Pada tahun 1963, Gunung Agung kembali aktif dan meletus secara

spektakuler mulai dari 18 Februari 1963 hingga 27 Januari 1964 (Kaler, Wayan. 20 September 2017).

Letusan Gunung Agung pada periode 1963-1964 merupakan kejadian letusan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan yang terjadi sebelumnya. Periode letusan dan aktivitas aktif Gunung Agung ini berlangsung selama hampir satu tahun penuh. Dampak letusan ini sangat merusak lingkungan, menyebabkan kerugian materi, merusak infrastruktur, dan menimbulkan banyak korban jiwa. Akibat dari letusan ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong banyaknya transmigran dari Bali ke daerah lainnya.

Setelah letusan Gunung Agung pada tahun 1963, program transmigrasi untuk masyarakat etnis Bali merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah guna mengatasi dampak bencana dan membantu korban letusan tersebut. Masyarakat Bali yang selamat dari bencana Gunung Agung kemudian dipindahkan ke beberapa pulau di Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera (Muriel Charras, 1997 dalam A. Efrianto, 2015, p. 66).

Pulau-pulau yang menjadi destinasi transmigrasi bagi masyarakat Bali setelah letusan Gunung Agung memiliki proses yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pada tahun 1965, transmigrasi masyarakat Bali ke Kalimantan, khususnya di Pontianak, menghasilkan pemukiman sendiri yang dikenal sebagai Desa Sedahan Jaya atau Benawai Agung (Superman, Yulita, 2012). Di Sulawesi, sebagai akibat dari bencana Gunung Agung tahun 1963, transmigrasi masyarakat Bali menghasilkan pemukiman sendiri yang dikenal sebagai Desa Werdhi Agung, terletak di Kecamatan Dumoga Tengah (Demakota, Claudia Mouren, dkk., 2017).

Sedangkan di Sumatera, transmigrasi masyarakat etnis Bali merupakan salah satu yang paling awal dan dilakukan secara masif. Di Sumatera Selatan, khususnya di Lampung, mereka menetap di Desa Nusa Bali, Kecamatan Balitang. Para transmigran dari Karangasem kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana sebagian melanjutkan perjalanan ke Sumatera Selatan dan sebagian lainnya menetap di Lampung (Ajisman dan Rois, 2012). Di Sumatera Utara, masyarakat Bali awalnya bekerja sebagai buruh di perkebunan karet di Tanjung Kabus Lubuk Pakam, sebelum kemudian pindah dan menetap di Langkat, khususnya di Kampung Bali, Desa Paya Tusam (Dana, I Dewa Putu, 25 Agustus 2023).

Masyarakat Bali yang melakukan transmigrasi dan menetap di Langkat sebelumnya bertempat di Medan yang awalnya bekerja di perkebunan Tanjung Garbus dan Bandar Selamat di kawasan Lubuk Pakam. Di Medan, kehidupan awal para transmigran Bali sangat menantang, karena mereka harus bekerja sebagai buruh kebun dari tahun 1963 hingga 1969. Meskipun bekerja keras, mereka masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan merasa tidak yakin akan kesejahteraan masa depan mereka. Hal ini mendorong mereka untuk mencari tempat tinggal baru demi meningkatkan kondisi ekonomi mereka (Hutapea, Andry Geneton, 2013).

Kesejahteraan merupakan prioritas utama bagi masyarakat transmigran, yang umumnya melakukan migrasi dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka. Biasanya, perpindahan manusia dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendorong (push factor) dan faktor penarik (pull factor) dan mungkin faktor lainnya (Sudarmo, 1965 dalam Lubis, Hafnita Sari Dewi, 2005, p. 2).

Faktor pendorong bagi masyarakat etnis Bali untuk melakukan transmigrasi ke Sumatera adalah letusan Gunung Agung pada tahun 1963. Sementara itu, faktor penarik transmigrasi adalah ketersediaan lahan pertanian dan lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian masyarakat Bali di daerah tujuan. Proses transmigrasi berlanjut ke Langkat, dimana ketidakpuasan masyarakat Bali saat bekerja sebagai buruh kebun di Tanjung Garbus dan Bandar Selamat di kawasan Lubuk Pakam menjadi faktor pendorongnya. Sementara itu, faktor penariknya termasuk tuntutan masyarakat transmigran yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi, yang menegaskan hak transmigran untuk mendapatkan bantuan, bimbingan, dan pembinaan dari pemerintah (Hutapea, Andry Geneton, 2013).

Upaya dalam mempercepat pencarian tempat tinggal baru, masyarakat Bali melakukan persiapan dengan bergabung dengan PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) di Kota Medan. Mereka meminta bantuan kepada organisasi tersebut untuk mencari tempat tinggal baru dan menyerahkan seluruh proses pengurusan kepada lembaga tersebut.

PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) adalah lembaga tertinggi agama Hindu di Indonesia yang didirikan di Denpasar, Bali, pada tanggal Soma Wage Julungwangi, Purnama Palguna Masa, Saka Warsa 1880. PHDI adalah badan yang anggotanya dipilih berdasarkan keyakinan pada Panca Sradha, yaitu Tattwa, Susila, dan Acara. Salah satu tanggung jawab PHDI adalah memberikan bantuan dalam menangani masalah kehidupan umat Hindu melalui ajaran Weda (<https://Parisada.or.id>).

PDHI menyetujui permohonan masyarakat Bali yang menginginkan pencarian hunian baru untuk kelangsungan hidup mereka. PDHI mengirimkan beberapa perwakilan untuk mengeksplorasi wilayah-wilayah yang dapat dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat Bali. Akhirnya, sebuah wilayah pedalaman di Kabupaten Langkat dianggap sesuai. Wilayah ini memiliki luas 180 hektar dan memiliki status Tanah Negara Bebas (TNB). Pemilihan lahan di pedalaman Kabupaten Langkat didasarkan pada jumlah total lahan yang tersedia untuk menjadi tempat tinggal dan pertanian, yang dianggap mencukupi untuk dibagikan kepada setiap kepala keluarga masyarakat Bali. Alasan lain adalah kesuburan tanah di wilayah ini, yang dianggap cocok untuk ditanami tanaman perkebunan seperti karet dan sawit.

Pada tahun 1974, masyarakat etnis Bali yang telah menetap di Kabupaten Langkat memulai langkah awal mereka berdasarkan dorongan dari tuntutan masyarakat transmigran yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1972. Sebagai respons, pemerintah mendukung program transmigrasi dengan menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu bagi para transmigran pada periode tersebut. Fasilitas yang disediakan mencakup pemberian lahan, bantuan dana, dan peralatan pertanian. Setiap kepala keluarga yang mengikuti program transmigrasi biasanya diberikan lahan garapan dengan luas sekitar 2 hingga 2,5 hektar. Selain itu, pemerintah juga menyediakan peralatan pertanian dan brosur-brosur penyuluhan tentang teknik pengelolaan lahan yang baik serta jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di lahan tersebut (Hutapea, Andry Geneton, 2013, p. 40).

Menurut Wayan Kariadi (2012) yang dikutip dalam Hutapea (2013), pada tahun 2002 terjadi puncak perkembangan di Kampung Bali, dimulai dari perubahan dalam struktur demografi yang awalnya didominasi oleh umat Hindu Bali, namun kemudian bercampur dengan individu yang beragama Islam dan Kristen dari suku Jawa dan Karo. Selain itu, pada tahun yang sama, terdapat perubahan signifikan dalam peningkatan ekonomi di Kampung Bali. Mereka yang sebelumnya bekerja sebagai Buruh Kebun kini telah menjadi pemilik kebun.

Berdasarkan pada pemaparan dan penjelasan proses transmigrasi masyarakat etnis Bali sebelum dan sesudah berada di Kampung Bali, Langkat. Maka, dapat digambarkan rute perjalanan transmigrasi masyarakat etnis Bali sebagai berikut;



Gambar 1.1 Rute Transmigrasi Masyarakat Etnis Bali di Kampung Bali, Langkat

Dari puncak perkembangan Kampung Bali yang ditandai dengan kedatangan masyarakat Karo dan Jawa, Masyarakat Byang menetap Dusun VI Kampung Bali, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, kini telah terdiri dari masyarakat multietnis yang terdiri dari masyarakat Bali, Karo, dan Jawa dalam kehidupannya

telah hidup berdampingan secara damai dan serasi. Kedatangan suku Karo dan Jawa justru dianggap sebagai dorongan bagi masyarakat Bali untuk lebih giat meningkatkan taraf hidup mereka. Masyarakat Bali tetap berupaya hidup secara harmonis baik itu sebelum ataupun sesudah kedatangan suku Jawa dan Karo di Kampung Bali. Hal ini karena masyarakat Bali sebelumnya telah memiliki atau mengenal suatu sistem organisasi yang disebut Organisasi Suka Duka. Organisasi ini ditujukan khusus bagi masyarakat Bali di Kampung Bali untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan masyarakat Bali sejak terbentuknya Kampung Bali hingga saat ini setelah berbaur dengan masyarakat suku lainnya organisasi ini masih menjadi organisasi penjaga keharmonisan di Kampung Bali.

Masih dalam perkembangan kehidupan masyarakat di Kampung Bali dari tahun 2002 hingga 2023, terjadi fenomena sosial di mana sebagian besar masyarakat etnis Bali memilih untuk bermigrasi ke Pekanbaru. Mereka menjual perkebunan mereka di Kampung Bali dan memulai kehidupan baru di Pekanbaru. Meskipun ada pengurangan dalam jumlah penduduk, Kampung Bali tetap dapat mempertahankan integritasnya dalam dinamika kehidupan. Hal ini terbukti pada bulan Juni 2023 ketika Kampung Bali diakui sebagai Kampung Percontohan kerukunan antar umat beragama oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat, H. Ainul Aswad, MA.

Perjalanan kehidupan masyarakat Etnis Bali di Kampung Bali dari tahun 1974 hingga 2002 mencerminkan awal dinamika kehidupan sosial dan ekonomi yang terjadi mulai dari *survive* sampai puncak perkembangan kehidupan. Kemudian, periode 2002-2023 menunjukkan pola perkembangan yang berulang dengan

beberapa inovasi dan penjelasan lebih rinci yang perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perkembangan Kampung Bali di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dari tahun 2002 hingga 2023. Penelitian ini akan memberikan pembaruan informasi serta analisis yang lebih mendalam mengenai perkembangan yang terjadi mulai dari puncak kehidupan masyarakat etnis Bali di Kampung Bali pada tahun 2002 hingga tahun 2023. Beberapa perkembangan signifikan yang terjadi berupa Organisasi Suka Duka sebagai penjaga harmoni di Kampung Bali, migrasi sebagian masyarakat etnis Bali ke Pekanbaru, dan pengakuan Kampung Bali sebagai Kampung Percontohan Kerukunan Umat Beragama.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah :

1. Desa Paya Tusan Dusun VI “Kampung Bali”, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat.
2. Meletusnya Gunung Agung 1963
3. Transmigrasi Masyarakat Etnis Bali pasca meletusnya Gunung Agung
4. Kebijakan transmigrasi Masyarakat Etnis Bali ke berbagai pulau di Indonesia
5. Faktor pendorong dan penarik Masyarakat Etnik Bali melakukan transmigrasi.
6. Kehidupan Masyarakat Etnik Bali di Medan sebelum bertransmigrasi ke Langkat.

7. Kehidupan Masyarakat Etnik Bali di Kampung Bali Tahun 1974-2002
8. Adaptasi Orang Bali dengan Orang Karo dan Jawa
9. Organisasi Suka Duka sebagai organisasi penjaga keharmonisan
10. Transmigrasi Masyarakat Etnik Bali dari Kampung Bali ke Pekanbaru
11. Kampung Bali sebagai salah satu “Percontohan Kerukunan Umat Beragama

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih memaksimalkan hasil penelitian, maka peneliti membatasi masalah penelitian pada point pembahasan ;

1. Adaptasi Orang Bali dengan Orang Karo dan Jawa
2. Organisasi Suka Duka sebagai organisasi penjaga keharmonisan Masyarakat
3. Transmigrasi Masyarakat Etnik Bali dari Kampung Bali ke Pekanbaru, Riau
4. Kampung bali sebagai salah satu “Percontohan Kerukunan Umat Beragama”

1.4 Rumusan Masalah

Untuk lebih mendekatkan tujuan dan mempermudah pembahasan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelien ini, yaitu :

1. Bagaimana Organisasi Suka Duka berperan sebagai organisasi penjaga keharmonisan di kampung Bali hingga saat ini ?
2. Bagaimana Pola Transmigrasi Masyarakat Etnik Bali dahulu hingga pola transmigrasi sekarang dari Kampung Bali ke Pekanbaru ?

3. Bagaimana Kampung Bali dapat dijadikan sebagai Kampung Percontohan Kerukunan Umat Beragama hingga saat ini ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Organisasi Suka Duka sebagai organisasi penjaga keharmonisan di kampung Bali hingga saat ini
2. Untuk mengetahui Pola Transmigrasi Masyarakat Etnik Bali dahulu dan pola transmigrasi sekarang dari Kampung Bali ke Pekanbaru
3. Untuk mengetahui Kampung Bali dapat dijadikan sebagai Kampung Percontohan Kerukunan Umat Beragama hingga saat ini

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Menambah wawasan penulis mengenai perkembangan kehidupan masyarakat etnik Bali di Kampung Bali tahun 2002 – 2023
2. Menambah informasi dan pengetahuan bagi pembaca baik dari kalangan mahasiswa maupun khalayak umum tentang perkembangan kehidupan masyarakat etnik Bali di Kampung Bali tahun 2002 – 2023
3. Sebagai penambah pengetahuan bagi para peneliti lain yang ingin melakukan penelitian ataupun penulisan karya ilmiah pada permasalahan yang sama